

PERUMUSAN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Herwani

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syarif Abdurrahman Singkawang

Email: herwani119033@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk memaparkan sebuah proses kebijakan yang ada di sistem pendidikan. sistem pendidikan nasional Indonesia telah menetapkan bahwa segala bentuk proses pendidikan yang ada dinegara Indonesia harus dilaksanakan dan dikembangkan secara maksimal. Pada sistem pendidikan seharusnya ada sebuah keputusan, agar dalam proses kebijakan diharapkan tepat sasaran. Pada sistem pendidikan juga perlu adanya agenda setting hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah terhadap kompetisi yang ada. Dalam hal ini perlu sebuah kerangka teori agar perumusan kebijakan memiliki arah dan tujuan sehingga formulasi kebijakan suatu lembaga pendidikan memiliki legitimasi. Pada perumusan kebijakan juga tidak lepas dari aktor dan pendekatan perumusan kebijakan.

Kata Kunci : Perumusan Kebijakan, Pendidikan

ABSTRACT

The purpose of this writing is to describe a policy process that exists in the education system. Indonesia's national education system has determined that all forms of educational processes that exist in Indonesia must be implemented and developed to the fullest. In the education system there should be a decision, so that the policy process is expected to be right on target. In the education system, it is also necessary to have an agenda setting, this is done to attract the government's attention to the existing competition. In this case, a theoretical framework is needed so that policy formulation has direction and goals so that the policy formulation of an educational institution has legitimacy. Policy formulation is also inseparable from actors and policy formulation approaches.

Keywords: Policy Formulation, Education

Pendahuluan

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional Indonesia telah menetapkan bahwa segala bentuk proses pendidikan yang ada dinegara Indonesia harus dilaksanakan dan dikembangkan secara maksimal agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan undang-undang tersebut tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan setiap warga negara memiliki wawasan keilmuan yang luas serta memiliki kepribadian yang luhur berlandaskan pancasila. Artinya bahwa tujuan pendidikan nasional di Indonesia menjadikan setiap warga negara menguasai aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilandasi oleh aspek sikap yang baik. Maka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan pengelolaan dan pengawasan mutu yang maksimal.

Pengelolaan mutu pendidikan nasional merupakan bagian penting yang harus dilakukan dalam proses manajemen pendidikan. Proses pengelola mutu pendidikan ini dapat dituangkan kedalam proses manajemen mutu pendidikan (Oktavia et al., 2021).

Berbicara mengenai pendidikan, masyarakat tidak akan pernah kehabisan bahan disebabkan banyak hal dalam pendidikan terutama Indonesia yang mesti diperbaharui terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang berlaku. Karena masa depan bangsa negeri ini bergantung akan formulasi pendidikan yang berlaku. Permasalahan tersebut selanjutnya dikaji dalam tulisan ini dengan memfokuskan kepada pendalaman makna dari pembuatan keputusan, agenda perumusan kebijakan, teori perumusan kebijakan, aktor dalam perumusan kebijakan, formulasi kebijakan pendidikan dan pendekatan dalam perumusan kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

a. Proses Pembuatan Keputusan

Suatu pembuatan keputusan harus memiliki dasar, Menurut Mann (1975) pembuatan keputusan pada dasarnya adalah memilih beberapa kegiatan yang sebelumnya melalui sebuah proses seleksi secara khusus dari beberapa alternatif yang akan dikerjakan bersama-sama dengan memperhatikan faktor ekstrinsik atau kondisi (situasi), oleh karena itu seorang pemimpin pendidikan harus mengetahui dan memahami dasar-dasar pembuatan keputusan tersebut. Dasar-dasar sebagai pembuatan keputusan yaitu pembuatan keputusan berdasarkan intuisi, pembuatan keputusan rasional, pembuatan keputusan berdasarkan fakta, pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, dan pembuatan keputusan berdasarkan wewenang.

Tugas dari seorang pemimpin yaitu pembuatan keputusan, dalam berorganisasi sebuah masalah merupakan hal yang biasa, dan tak jarang pula harus memilih salah satu pilihan yang menurut semua orang terbaik dan mayoritas sebuah keputusan tersebut diambil oleh pemimpin tanpa adanya keraguan karena hal tersebut menyangkut masa depan suatu organisasi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin sebelum melakukan pembuatan keputusan yaitu langkah-langkah. Simon (1997) menggambarkan proses pembuatan keputusan terdiri atas 3 langkah diantaranya: 1) identifikasi dan pemilihan masalah, 2) pengembangan alternatif pemecahan masalah, 3) Memilih alternatif pemecahan yang terbaik.

Pemimpin dalam pembuatan keputusan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembuatan keputusan, yakni langkah-langkah dalam pembuatan keputusan. Menurut Robbin (1985) langkah-langkah pembuatan keputusan individu diantaranya: (1) menentukan kebutuhan

keputusan, (2) mengidentifikasi kriteria keputusan, (3) menentukan alokasi pembobotan keputusan, (4) mengembangkan alternatif, (5) mengevaluasi alternatif, dan (6) menyeleksi alternatif terbaik. Sedangkan proses pembuatan keputusan kelompok oleh Ows (1987) meliputi: (1) mengidentifikasi dan mendefinisikan problema, (2) mendeskripsikan keterlibatan masing-masing personel dalam pembuatan keputusan, (3) mengumpulkan informasi yang terkait dengan pembuatan keputusan (Mustiningsih 2018).

b. Agenda Perumusan Kebijakan

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar (Wahab 1997). Pada kebijakan pendidikan perlunya perumusan sehingga perumusan kebijakan menjadi langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sebab sering kali para pembuat kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konsep yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi.

Dalam perumusan kebijakan memiliki masalah dalam penentuan suatu kebijakan, sehingga perlunya agenda setting. Dalam agenda setting muncul kompetisi dikalangan aktor pembuat kebijakan. Mereka melontarkan berbagai isu yang akan dijadikan agenda pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah terhadap kompetisi yang ada. Isu dari aktor dan kelompok masyarakat terkait akan menjadi agenda diskusi kebijakan. Davies dalam Lester dan Stewart (2000) menjelaskan ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh aktor pendidikan dan kelompok masyarakat berkompetisi merumuskan masalah yaitu 1) inisiasi masalah yang timbul didalam masyarakat yang mendorong masing-masing individu melakukan aksi, 2) difusi, mentransformasikan masalah agar menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. 3) prosesing, mengkonversikan isu kedalam item-item agenda.

Untuk mengetahui tentang agenda setting kita harus mencari tahu apa itu masalah kebijakan pendidikan, karena nantinya akan dibuat agenda settingnya. Karena agenda setting adalah suatu tahap diputuskannya masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan. Agenda setting merupakan sebuah langkah awal dari keseluruhan tahapan perumusan masalah kebijakan pendidikan. Sehingga agenda setting menjadi tahapan yang sangat penting dalam analisis rumusan masalah kebijakan pendidikan.

Agenda setting adalah tahap penjabaran tahapan perumusan masalah kebijakan pendidikan. Di dalam masalah kebijakan dan agenda setting ini nantinya akan dapat diketahui ke arah mana kebijakan pendidikan itu dibuat oleh pemerintah, apakah berpihak kepada rakyat atau sebaliknya. Dalam penentuan kebijakan pendidikan, sangatlah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yakni mereka yang berada di sekitar pengambil kebijakan dan pengambil keputusan (Arwildayanto 2018).

c. Teori Perumusan Kebijakan Dalam Pendidikan

Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (publik opinion) dan suara publik (publik voice), seperti dijelaskan oleh Parson (1997). Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (*value free*) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (Muliadi).

Pada perumusan kebijakan pendidikan memiliki teori yang mampu mengarahkan arah kebijakan, namun dalam tulisan ini hanya akan dibahas beberapa teori saja. Berikut teori perumusan kebijakan pendidikan.

1. Teori inkrementalis, teori ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan dimasa lalu sehingga perlu mempertahankan kinerja baik yang telah dicapai, teori ini memiliki sifat pragmatis (Rahman 2022).
2. Teori demokratis, teori ini implementasinya pada good governance bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen, dan pemanfaat (beneficiaries) diakomodasi keberadaan. Apabila teori ini mampu dijalankan maka sangat efektif karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan karena masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan.
3. Teori Strategis, Inti dari teori ini adalah perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. Fokusnya lebih kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi dan berorientasi kepada tindakan. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan memperhatikan konsekuensi masa depan.
4. Teori pilihan publik, teori ini sebagai proses keputusan kolektif dari setiap individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Intinya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan dan ini secara umum merupakan konsep

formulasi kebijakan yang paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan.

5. Teori sistem, rumusan kebijakan dengan model sistem mengibaratkan bahwa kebijakan merupakan hasil (output) dari sistem politik. Seperti dalam ilmu politik, maka sistem politik terdiri dari input, throughput dan output. Sehingga dapat dipahami, proses formulasi kebijakan publik dalam sistem politik mengandalkan masukan (input) yang terdiri dari tuntutan dan dukungan (Tilaar & Nugroho 2012).

d. Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

Aktor adalah Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses merumuskan kebijakan yang akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan (*policy maker*).

Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern, dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi dan lain-lain. Untuk dapat tetap bertahan bermain di dalam sistem tersebut, mereka harus memiliki komitmen terhadap aturan main, yang pada mulanya dirumuskan secara bersama-sama oleh semua aktor. Pada tataran ini komitmen para aktor akan menjadikan menjadikan mereka mematuhi aturan atau norma bersama. Selain itu, kepatuhan terhadap norma ini bahkan menjadi keharusan, karena diasumsikan bahwa pencapaian tujuan sistem akan terwujud jika semua aktor mematuhi norma bersama.

Di Indonesia pengaruh aktor-aktor elit dalam proses pembuatan kebijakan sangat kental. Aktor tersebut dapat berasal dari institusi formal seperti lembaga legislatif dan eksekutif ataupun dari noninstitusional seperti kelompok kepentingan dan partai politik *Sharing power* hanya terjadi dalam tataran fundamental kebijakan, akan tetapi tidak terjadi dalam tataran empiris dalam arti *sharing power* menjadi sumber terjadinya dominasi power oleh aktor-aktor kunci tersebut (Triastuti 2003).

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut terbagi dalam:

1. Legislatif

Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Peran mereka sangat menentukan, karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah ada ditangan mereka. Legislatif disebut

sebagai aktor utama dalam merumuskan / mengesahkan kebijakan, para legislator tersebut berada pada tataran MPR, DPD, DPR dan DPRD.

2. Eksekutif

Eksekutif disini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional. Eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat legislatif dalam bentuk kebijakan jbaran. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif serta merumuskan kembali atau tidak merumuskan dengan alasan tertentu. Aktor eksekutif disini antara lain Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Dinas. Sedangkan aktor eksekutif dalam bidang pendidikan adalah Mendiknas, Menag, Dirjen, Kepala Dinas, dan Rektor (Hasbullah 2015).

3. Administrator

Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan Negara yang akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan utama masyarakat sejahtera. Formulasi merupakan langkah awal dan menjadikan pedoman bagi para administrator dalam menjalankan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya. Administrator sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan yang dibuatnya. Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Peran administrator sebagai actor dalam kebijakan public sangat menentukan akan terumusnya suatu kebijakan untuk tercapainya suatu tujuan dengan berbagai keahlian yang dimiliki oleh administrator, Peran para actor administrator dalam proses suatu kebijakan akan ditentukan oleh kecermatan dan kepiawaian dalam memahami dan melaksanakan tahapan-tahapan proses kebijakan itu dirumuskan. Kegiatan ini merupakan pengawalan agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan harapan (Aripin & Daud 2014).

4. Partai Politik (Parpol)

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Di Indonesia peran Parpol sangat besar sehingga hampir semua aspek kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan akan melibatkan Parpol. Peran parpol disini dengan menempatkan anggotanya di legislatif dan pimpinan Negara maupun daerah.

5. *Interest Group* (kelompok berkepentingan)

Interest Group ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama, seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok profesional lainnya. Kelompok ini berusaha mempengaruhi perumus kebijakan formal agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dirumuskan. Kelompok ini biasanya memiliki tuntutan yang bersifat khusus, sempit, dan spesifik.

6. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Ormas merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat nonpolitis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Ormas dapat berdiri sendiri (independen) atau berafiliasi dengan organisasi politik tertentu. Dalam perumusan kebijakan pendidikan ormas memiliki harapan dan aspirasi yang kemudian disampaikan kepada para perumus kebijakan formal. Di Indonesia ada beberapa ormas yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah seperti NU dan Muhammadiyah.

7. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga dimana para elite akademisi berada, perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan. Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena disinilah nilai-nilai idealisme masih dipertahankan, dan dalam mengupayakan berbagai kebijakan tidak akan lepas dari muatan-muatan intelektual. Perumusan kebijakan yang baik seharusnya memuat naskah akademik yang dibahas bersama para akademisi di perguruan tinggi.

8. Tokoh perorangan.

Dalam berbagai konstelasi, tokoh perorangan memegang peran cukup vital dan terkadang sangat menentukan, dia juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya (Hasbullah 2015).

e. Formulasi Kebijakan Pendidikan

Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Dalam undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I dijelaskan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003).

Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik adalah kebijakan sebagai keputusan tetap dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan yang mematuhi keputusan tersebut. Konsistensinya ditinjau berdasarkan hirarki kebijakan yaitu: *Policy level* (undang-undang, TAP MPR), *organization level* (PP, Kepres, Kepmen), dan *operational level* (Dirjen) (Emzir 2010). Kebijakan pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Oleh karena pendidikan merupakan ilmu praksis maka kebijakan pendidikan merupakan proses pemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan alam dan sosialnya. Sehingga kebijakan pendidikan adalah penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praksis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan tersebut dapat menggunakan model-model yang telah baku, walaupun model-model tersebut mempunyai kelemahan dan kekurangan, namun dengan kombinasi berbagai model dapat dihasilkan proses kebijakan yang layak (Bakry 2010).

f. Proses Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan

Konsep legitimasi diidentifikasi dengan perspektif individu terhadap kekuasaan. Ini berarti apakah daerah setempat mengakui dan memandang hak perintis untuk membuat dan melaksanakan apa yang mengikat daerah setempat atau tidak. Dalam hal daerah setempat mengakui dan memandang hak perintis untuk membuat dan melaksanakan apa yang mengikat daerah setempat, maka kewenangan itu diatur sebagai otentik atau berlegitimasi. Artinya, keaslian adalah pengakuan dan pengakuan masyarakat atas keistimewaan para pionir, untuk menetapkan dan melaksanakan pilihan politik. Secara etimologis legitimasi berasal dari bahasa Latin *Lex* yang mengandung arti hukum. Kata legitimasi tidak dapat dipisahkan dari kata-kata seperti keaslian, kehalalan dan kenyataan. Jadi kenyataan yang jelas adalah menunjukkan keserupaan dengan hukum yang berlaku, atau aturan yang ada, apakah aturan formal yang sah, baik, standar atau sosial sudah cukup lama ditetapkan secara sah atau tidak.

Menurut Zimmerman dan Zeitz, legitimasi dapat dilihat sebagai penilaian sosial terhadap penerimaan, kesesuaian, dan atau atau keinginan. Legitimasi dalam pelayanan publik dapat dimaknai sebagai penerimaan, kesesuaian atau keinginan masyarakat terhadap organisasi. Sedangkan menurut Nor Hadi legitimasi adalah keadaan psikologis keberpihakan orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya berupa fisik maupun non fisik. Teori legitimasi penting bagi organisasi karena teori legitimasi didasari oleh norma-

norma, nilai-nilai dan peraturan sosial, sehingga organisasi merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi (Setiawan 2021).

Legitimasi adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di antara kegiatan perumusan dengan pelaksanaan kebijakan. Sebelum kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan, terlebih dahulu harus dilegitimasi. Suatu kebijakan perlu dilegitimasi karena hasil rumusan kebijakan tersebut perlu mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Pada rumusan masalah pastinya banyak permasalahan dalam melakukan legitimasi. Ada banyak permasalahan dalam pelaksanaan legitimasi kebijakan pendidikan, diantaranya permasalahan tersebut yaitu:

1. Adanya penolakan dari pelaksana rencana sebelumnya yang tidak lagi berkinerja. Ada kecenderungan bahwa rencana awal pelaku memutuskan bahwa apa yang telah diselidiki, bahkan dilakukan, dapat diakumulasi ke masa lalu.
2. Adanya hambatan dari pertemuan yang moderat hingga sistem yang dibuat akhir-akhir ini. Apabila permintaan yang diajukan secara point demi point adalah novel, hal itu diidentikkan dengan pendekatan masa lalu yang selama ini dipandang tradisional. Sesuatu yang tradisional umumnya sulit diubah dan jika Anda ingin mengubahnya dalam masyarakat moderat, hal itu membutuhkan usaha.
3. Adanya perlawanan terhadap acara-acara sosial konservatif dan pendekatan masa lalu dari para eks actor yang sebelumnya tidak lagi menjadi aktor, sekarang ini sedang digerakkan sebagai aktor dan sekutu. Umumnya, para pengagum ini juga akan mengikuti sebagian besar peristiwa dan langkah pemimpin mereka. Sejalan dengan itu, asosiasi legitimasi menjadi melemahkan, atau membutuhkan waktu yang lama (Setiawan 2021).

Pada legitimasi kebijakan perlu juga adanya konukasi dalam setiap kebijakan terutama dalam bidang pendidikan. Komunikasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide maupun sikap tentang aturan-aturan dalam pendidikan. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, komunikasi sangat diperlukan karena memiliki beberapa alasan yaitu:

1. Agar para pelaksana kebijakan pendidikan serta khalayak umum dapat lebih memahami lebih dalam Penyebab utama tidak diterimanya suatu kebijakan bisa jadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang rumusan kebijakan yang telah dibuat. Maka dari itu, kebijakan pendidikan harus terus menerus dikomunikasikan kepada masyarakat agar dapat dipahami lebih dalam.
2. Agar terhindar dari kesalahpahaman Kesalahpahaman seringkali menjadi penyebab gagalnya sosialisasi suatu rumusan kebijakan. Komunikasi yang

dilakukan secara terus menerus bisa mengoreksi kesalahpahaman masyarakat terhadap suatu kebijakan.

g. Pendekatan Dalam Perumusan Kebijakan

Secara teoritik, pendekatan perumusan kebijakan di bidang pendidikan tidak berbeda dengan pendekatan perumusan kebijakan publik, karena kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan publik. Berikut ini beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam kerangka perumusan kebijakan pendidikan:

1. Pendekatan kelembagaan, pendekatan ini mengandalkan bahwa tugas membuat kebijakan pendidikan merupakan kewenangan pemerintah. Pendekatan ini dipandang paling sederhana dan sempit dalam perumusan kebijakan pendidikan. Pendekatan ini mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan pendidikan dan berbagai tingkatan dalam perumusan kebijakan.
2. Pendekatan proses, pendekatan ini menformulasikan kebijakan pendidikan melalui tahapan-tahapan yang runtut, tidak melompat-lompat atau langsung jadi. Menurut pendekatan ini, kebijakan pendidikan dipandang sebagai proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan pendidikan, formulasi proposal kebijakan pendidikan, legitimasi kebijakan pendidikan, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan.
3. Pendekatan teori kelompok, menurut pendekatan ini kebijakan pendidikan merupakan titik keseimbangan, yang berarti interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan terbaik. Berdasarkan pendekatan ini, individu dalam kelompok kepentingan berinteraksi secara formal maupun informal dengan cara langsung maupun melalui media masa menyampaikan tuntutananya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang diperlukan.
4. Pendekatan elitis, dalam sistem politik kebijakan pendidikan dibuat dan banyak dipengaruhi oleh para elite dari sistem itu. Dengan demikian kebijakan pendidikan mencerminkan keinginan dan kehendak kaum elit saja, tanpa ada aspirasi masyarakat.
5. Pendekatan rasional, mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social gain*, yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai serta lebih menekankan pada aspek efisiensi atau ekonomis (Hasbullah 2015).

Kesimpulan

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional Indonesia telah menetapkan bahwa segala bentuk proses pendidikan yang ada dinegara Indonesia harus dilaksanakan dan dikembangkan secara maksimal agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan undang-undang tersebut tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan setiap warga negara memiliki wawasan keilmuan yang luas serta memiliki kepribadian yang luhur berlandaskan Pancasila. Artinya bahwa tujuan pendidikan nasional di Indonesia menjadikan setiap warga negara menguasai aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilandasi oleh aspek sikap yang baik.

Pada sistem pendidikan seharusnya ada sebuah keputusan, agar dalam proses kebijakan diharapkan tepat sasaran. Suatu pembuatan keputusan harus memiliki dasar, yaitu memilih beberapa kegiatan yang sebelumnya melalui sebuah proses seleksi secara khusus dari beberapa alternatif yang akan dikerjakan bersama-sama dengan memperhatikan faktor ekstrinsik atau kondisi (situasi), oleh karena itu seorang pemimpin pendidikan harus mengetahui dan memahami dasar-dasar pembuatan keputusan tersebut. Pada keputusan tersebut setidaknya memiliki masalah yang dihadapi sehingga perlu juga suatu perumus kebijakan dalam menentukan keputusan.

Dalam perumusan kebijakan memiliki masalah dalam penentuan suatu kebijakan, sehingga perlunya agenda setting. Dalam agenda setting muncul kompetisi dikalangan aktor pengambil kebijakan. Mereka melontarkan berbagai isu yang akan dijadikan agenda pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah terhadap kompetisi yang ada. Isu dari aktor dan kelompok masyarakat terkait akan menjadi agenda diskusi kebijakan. Pada perumusan kebijakan pendidikan memiliki teori yang mampu mengarahkan arah kebijakan, teori tersebut antara lain: Teori inkrementalis, Teori demokratis, Teori Strategis, Teori pilihan publik, dan Teori sistem.

Dalam sebuah formulasi juga perlunya legitimasi serta konukasi kebijakan agar sebuah konsep bisa berjalan lancar. Konsep legitimasi diidentifikasi dengan perspektif individu terhadap kekuasaan. Ini berarti apakah daerah setempat mengakui dan memandang hak perintis untuk membuat dan melaksanakan apa yang mengikat daerah setempat atau tidak. Pada legitimasi kebijakan perlu juga adanya konukasi dalam setiap kebijakan terutama dalam bidang pendidikan. Komunikasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide maupun sikap tentang aturan-aturan dalam pendidikan. Secara tidak langsung suatu formulasi juga perlunya pendekatan untuk menggapai kebijakan. Pendekatan perumusan kebijakan di bidang pendidikan tidak berbeda dengan pendekatan perumusan kebijakan publik, karena kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan publik. Ada beberapa pendekatan yaitu, Pendekatan kelembagaan,

Pendekatan proses, Pendekatan teori kelompok, Pendekatan elitis dan Pendekatan rasional,

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, dkk, (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif)*, Bandung : Cendikia Press.
- Bakry, Aminuddin (2010). “Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan public”, *Jurnal MEDTEK*, Volume 2, Nomor 1, April 2010.
- Emzir, M. Chan, (2010). *Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Farid Setiawan, (2021). *Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan*, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan* Volume 6, No. 2, 2021
- Fatah, Nanang. (2013) *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Freire, Paulo. (2004). *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj.Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto. Yogyakarta: Read Pustaka.
- H.A.R.Tilaar, Riant Nugroho, (2012). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Maria Rosarie Harni Triastuti, (2003). “Rekonsiliasi Nilai Demokrasi dan Birokrasi dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik”, *JAP*, Nomor 2 Volume 2003 Oktober 2003, ISSN 1214-7040.
- Hasbullah, (2015). “Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Linda Sari Oktavia,dkk, (2021). *Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi*, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* Vol. 6, No. 1, 2021.
- Mustiningsih,dkk, (2018). *kepemimpinan kepala sekolah dalam pembuatan keputusan*, *JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Volume 1, Nomor 3 September 2018.
- Rahman, Abdul, dkk, (1997). *Formulasi Kebijakan Pendidikan*, *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 13 , No. 1, Juni 2022Abdul Wahab, S. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sholih Muliadi, *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, *jurnal review politik*, Volume 06, No 02.
- Sofjan Aripin, Muhammad Daud, (2014). “Peran Administrator Publik dalam Formulasi dan Implementasi kebijakan”, *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol.06 No. 01 Februari 2014.
- Syafarudin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, HAR. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan. Magelang: Indonesia Tera*. UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Th. 2003 (Jogyakarta: Absolut)